

PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA SEBAGAI PEMILIH PEMULA DI KOTA SINGKAWANG

Sitti Uswatun Hasanah¹, Sulha²

^{1,2} Dosen Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengatahuan Sosial, IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera No. 88 Kota Baru Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
e-mail: sittiushatunhasanah@gmail.com, sulha.akhmad@gmail.com

Abstrak

Siswa sebagai warga negara Indonesia yang dikategorikan sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti kegiatan politik. Melalui pendidikan politik, siswa dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya dalam berpartisipasi politik baik di sekolah maupun dalam pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik penelitian angket/google form, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, pada siswa SMA/SMK/MA se-Kota Singkawang. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu siswa sebagai pemilih pemula perlu memahami pentingnya pendidikan politik dan juga mendukung kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan politik. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pendidikan politik terhadap siswa di sekolah, dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn, kegiatan OSIS, kegiatan Pramuka, dan melalui sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang. Siswa yang memperoleh pendidikan tersebut, partisipasi politiknya menjadi meningkat ditandai dengan dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan kesadaran siswa berpartisipasi dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah. Partisipasi politik siswa juga terlihat dari kesiapan mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula, untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024.

Kata Kunci: Pendidikan politik, Partispasi politik, Siswa, Pemilih Pemula

Abstract

Secondary education students are Indonesian citizens who are categorized as first-time novice voters who are participating in political activities for the first time. Political education can increase students' awareness and knowledge in participating in politics, both in schools and in elections. This study aims to find out and analyze how political education can increase students' political participation as novice voters. This research uses a Descriptive method with research techniques for questionnaires / google forms, interviews, observations, and documentation studies, in SMA/SMK/MA students throughout Singkawang City. The findings obtained by the authors in this study are that students as novice voters need to understand the importance of political education and also support activities related to political education. Based on the results of the study, it was concluded that political education for students in schools was carried out through PPKn subjects, student council activities (OSIS), Scout activities (Pramuka), and through election socialization conducted by the General Election Commission (KPU) of Singkawang City. Students who obtain such education, their political participation becomes increased. This is characterized by students being able to give opinions and arguing in the classroom, as well as having the awareness to participate and be active in organizations in the school. The political participation of students can also be seen from their readiness as novice voters, to take part in the 2024 general election.

Keywords: Political Education, Political Partispation, Student, Novice Voter

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang menganut pemerintahan demokrasi memerlukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Peran rakyat dalam pemerintahan demokrasi sangat dibutuhkan dalam kemajuan bangsa dan negara. Diharapkan setiap warganegara mau melibatkan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan agar terciptanya kehidupan negara yang demokratis. Menurut Wuryan dan Syaifullah (2008) bahwa:

Dalam suatu negara yang demokratis, partisipasi warganegara merupakan syarat pokok atau utama yang mesti dilakukan oleh setiap warganegara dalam proses politik. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan sendirinya akan mengalami hambatan mana kala warganegara tidak partisipatif dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan negaranya. Namun sebaliknya jika warga negaramampu melibatkan dirinya atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, maka akan mendorong terwujudnyakehidupan masyarakat yang demokratis.

Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik sedangkan negara yang demokratis memerlukan partisipasi warga negaranya, maka dari itu masyarakat harus diberi pendidikan politik agar masyarakat bisa memahami perannya sebagai warganegara dalam kegiatan politik dan menjalankan kegiatan politik.

Bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum atau pemilu adalah sebuah pesta besar demokrasi yang dilaksanakan sebuah negara yang menggunakan paham demokrasi. Pemilu adalah pembuka jalan untuk menegakkan demokrasi. Di negara Indonesia, sarana pendeklarasian diri rakyat dan demokrasi kepada negara dan pemerintah diwujudkan dalam bentuk memberikan suara saat penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Dalam usia sekolah, pemilih pemula berada di tingkat kelas XI dan XII pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA).

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, *twitter*, *facebook*, *linked in*, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk

mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (*exist*) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu.

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini.

Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih pemula tersebut. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu, baik dengan melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut.

Kurang pahamiya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum, pemilih pemula mudah di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga mulai dari orang tua hingga kerabat dan masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara untuk merangsang partisipasi pemilih pemula.

Salah satu upaya agar mendorong pemilih pemula agar bisa ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, adalah dengan adanya pendidikan politik. Kartono (2009) mengemukakan bahwa:

Tugas pendidikan politik ialah menyadarkan fungsi politik setiap individu untuk menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam proses politik. Tujuannya ialah agar pemerintah yang menerapkan kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh warga negaraditengah banyak konflik dan perbedanaan kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh rakyat. Jelaslah dalam proses pendidikan politik itu rakyat diajak ikut mempengaruhi politik pemerintah dalam iklim demokratis. Sebab partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan politik organ-organ kenegaraan di semua sendi dan sektor itudianggap perlu. Oleh karena itupendidikan politik dapat disebutsebagai *staatburglijke worming* (pendidikan pembentukkewarganegaraan).

Berdasarkan pendapat diatas pendidikan politik memiliki tugas untuk menyadarkan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pendidikan politik menumbuhkan kesadaran politik pada setiap orang yang mempelajarinya, kemudian setelah sadar mereka akan ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara berpartisipasi dalam segala kegiatan politik pemaparanini sejalan dengan pendapat dari Wuryan dan Syaifullah (2008) bahwa:

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara mesti dilandasi dengan kesadaran politik sebagai warga negara. Dan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut pendidikan politik memiliki kedudukan yang sangat penting. Pendidikan politik (*political education*) sebagai salah satu konsep dalam ilmu politik, berkenaan dengan bagaimana usaha atau upaya yang dilakukan agar warga negara atau masyarakat mengerti dan memahami politik.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan baik karena manfaat pendidikan politik sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008) bahwa, pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesedaran warganegara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Pendidikan politik yang dilaksanakan dengan baik, terencana, terprogram, terarah, terkendali akan berkontribusi positif bagi bangsa.

Mengingat begitu peran yang begitu penting dari pendidikan politik, maka harus dijalankan dengan baik agar manfaat dari pendidikan tersebut dapat memberi perubahan pada bangsa ini. Pendapat lain mengaenai pentingnya menjalankan pendidikan politik dengan baik dikemukakan oleh Kartono (2009) bahwa:

Jika pendidikan politik tersebut dilakukan dengan baik dan sistematis maka pasti akan ditumbuhkan kekuatan-kekuatan kontra yang demokratis dan positif konstruktif. Yaitu menjadi kekuatan yang kritis untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak sehat, buruk, tidak adil, tidak mantap, dan tidak wajar. Kemudian orang berusaha menciptakan iklim yang lebih demokratis dan lebih sehat, untuk membuat kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya menjadi lebih baik.

Pendidikan politik merupakan upaya untuk membentuk seseorang agar memiliki kesadaran politik dan kesadaran politik itu ada setelah memperoleh pengetahuan politik dari lembaga formal maupun non formal. Pendidikan politik tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga pendidikan saja, tapi seluruh lembaga pendidikan politik harus bersama-sama memberikan pendidikan politik pada warga negara agar warga negara tersebut memiliki kesadaran politik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ruslan (2000) bahwa:

Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha ,membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengankultur politik orang-orang yang bergerak dalam lembaga tersebut. Pada setiap warga negara membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatnya, yang warga negara menjadi sadar dan maupun memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan berpartisipasi secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan mengantarkan kepada perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas, yang berperan dalam pendidikan politik adalah lembaga-lembaga politik formal maupun non formal/Lembaga politik seperti keluarga, sekolah, dan media informasi. Apabila lembaga-lembaga ini menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan politik dengan baik, maka tujuan pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran politik siswa akan tercapai. Kesadaran politik yang ditujukan oleh siswa adalah kepribadian politik, perilaku politik, dan partisipasi politik.

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

David Easton dan Jack Dennis (Suwama Al Muchtar, 2000: 39) dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai *political socialization* yaitu bahwa “*Political socialization is development process which persons acquire orientation and patternsof behaviour*”. Sedangkan Fred I. Greenstein (Suwama Al Muchtar, 2000: 39) dalam bukunya *Political Socialization* berpendapat bahwa: *Political socialization is all political learning formal and informal, deliberate and unplanne, at every stage of the life cycle including not only explicit political learning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquisition of politically relevant personality characteristics.*

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Dalam menjalankan dan mengoptimalkan proses sosialisasi politik maka perlu strategi dan tempat yang tepat di mana sosialisasi politik itu dilaksanakan, salah satu contoh bahwa sebagai salah satu sarana atau agen tempat sosialisasi politik itu adalah di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu wahana yang luas untuk sosialisasi politik. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat ataupun politik yang demokratis.

Selama ini kita kebanyakan menganggap bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal dengan kutub yang berbeda. Politik berorientasi kepentingan sedangkan pendidikan justru mengajarkan untuk merangkul semua kepentingan sehingga menjadi seperti tanpa kepentingan. Oleh karenanya kedua hal tersebut senantiasa dipisahkan. Bahkan saat orde baru, kata “politik” di sekolah seolah-olah menjadi momok yang sangat menakutkan. Apapun yang berbau politik, di sekolah adalah hal yang tabu untuk dipelajari, bahkan dianggap “haram”.

Mungkin sebagian besar dari kita merasa takut jika politik dimasukkan dan “mengotori” dunia pendidikan. Atau bahkan politik menjadikan pendidikan sebagai kepanjangan tangannya untuk memperluas kekuasaan. Secara salah banyak diantara kita menafsirkan konsep Paulo Freire mengenai pendidikan yang melanggengkan ketertindasan (*pedagogy of the oppressed*) akan terjadi pada dunia pendidikan yang dicampuradukkan dengan dunia politik. Padahal, pendidikan politik yang benar bisa menjadi pondasi seseorang agar tidak salah langkah dalam dunianya nanti. Kelak mereka yang terdidik secara politik idealnya mampu menjadi pribadi yang sportif (berani menerima kekalahan), tidak berbuat curang, dan lebih paham akan hak dan kewajiban yang ia miliki di lingkungan manapun ia tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.

METODE

Kualitatif adalah bentuk penelitian yang dipilih dengan alasan bahwa dalam penelitian

ini, peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di kota singkawang. Dan subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI dan XII dari 32 SMA/SMK/MA yang ada di Kota Singkawang. Sumber data lainnya adalah Kepala Sekolah, Guru PPKn, pembina Pramuka, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Singkawang Kalimantan Barat. Dan observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi dan studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan politik di sekolah harus ditanamkan ketika siswa sudah mulai bisa menerjemahkan dan merasakan bahwa dia, dari sudut pandang pembuat kebijakan (*decision maker*) adalah objek yang terimbas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Konsep pendidikan politik dalam sekolah bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Pendidikan politik di sekolah lebih mengarah pada pembentukan kultur/budaya sederhana yang mencirikan demokrasi dan kemandirian. Inilah yang menjadi landasan dasar terwujudnya kehidupan yang demokratis nantinya.

Politik di sekolah tidak perlu ditafsirkan sebagai secara langsung menghadapkan siswa pada tataran politik praktis seperti layaknya konteks perebutan kekuasaan, hubungan penguasa dengan yang dikuasai. Dalam hal ini pendidikan politik di sekolah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dengan lebih menonjolkan tumbuhnya budaya positif dalam pergaulan. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, adanya kebebasan yang besar bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum kelas. Metode-metode diskusi harus dilakukan sesering mungkin dan tidak hanya berangkat dari buku-buku teks. Dalam hal ini, harus disadari bahwa secara ilmiah tidak ada sesuatu yang memiliki kebenaran absolut. Tugas seorang guru bukanlah mencekoki siswanya dengan ‘kebenaran absolut’ berdasarkan penafsirannya saja, guru harus mampu menjadi wadah atau media bagi siswa dalam menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Guru tidak boleh langsung menyalahkan pendapat dari siswanya. Ia harus bisa membangun pola pikir rasional dengan melontarkan argumentasi dalam berpendapat. Tentu saja ini juga akan menambah semangat dan keaktifan siswa karena siswa merasa dihargai.

Kedua, adanya komunikasi dua arah yang cair antara guru dan siswa. Bila kita terbiasa dengan cara-cara komunikasi yang serba resmi dan kaku, seperti saat guru mengajar di kelas, maka konsep pendidikan politik yang harus diterapkan adalah menciptakan ruang-ruang komunikasi yang tidak kaku. Dengan begitu siswa bisa menyampaikan ide-ide secara bebas,

terbuka dan kritis. “Komunikasi yang berjalan dua arah dan tidak kaku tersebut jelas berujung pada tumbuhnya rasa percaya diri pada siswa yang pada gilirannya nanti akan melatih kreativitas dan kemandirian mereka,” ujarnya.

Ketiga, keteladanan dalam kehidupan berorganisasi. Sekolah merupakan sistem organisasi yang meliputi hubungan antara kepala sekolah, pegawai, guru hingga para siswa. Meskipun berbagai teori mengenai kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat telah disampaikan oleh para guru, namun tanpa contoh langsung walaupun dalam sekup kecil, maka teori-teori akan menguap dan hanya sekedar membekas di catatan raport para siswa. Bagaimana seharusnya pemimpin bersikap kepada bawahan atau sebaliknya, bagaimana bekerjasama yang baik dengan rekan seorganisasi, menumbuhkan sikap empati dan tenggang rasa dengan teman, semua itu juga bisa dicontohkan lewat organisasi.

Melalui konsep-konsep sederhana itulah, pendidikan politik bisa dimulai dari sekolah. Dengan terciptanya ruang-ruang aktualisasi bagi siswa, maka kelak ketika sudah semakin matang, mereka sudah terbiasa dengan budaya/kultur keterbukaan, menghargai pluralitas, menghayati proses dialektika, saling memberi respon/umpan balik, menganalisis persoalan secara rasional, dan saling menghargai pendapat orang lain tanpa harus merasa selalu benar sendiri.

Dalam bukunya yang sangat populer, *Democracy and Education*, John Dewey menjelaskan bahwa salah satu kesalahan dari pengajaran yang terjadi di sekolah adalah ketika materi sekolah tidak mengarahkan para siswa untuk hidup di dunia nyata. Memang benar demikian, keberhasilan pendidikan adalah ketika para peserta didik benar-benar belajar untuk hidupnya dan bahkan berpikir menyelesaikan permasalahan yang ada di sekelilingnya. Itulah mengapa kebangkitan nasional diawali dari dunia pendidikan yang memang memiliki potensi kekuatan pengubah masyarakat yang sangat besar.

Pendidikan politik bukan berarti mengarahkan anak-anak pada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Pendidikan ini justru mengenalkan anak pada nilai-nilai penting politik dimulai dari kehidupan sekolah. Mereka diajarkan bagaimana sebenarnya kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara melalui contoh nyata yang dilakukan oleh para pengajar maupun dalam sistem sekolah itu sendiri, yang mana pendidikan utamanya terjadi melalui komunikasi dan keteladanan (*modelling*). Demikian pula dengan pendidikan politik, hal tersebut dapat diajarkan tanpa harus membuat mata pelajaran baru, tapi melalui keteladana seperti yang telah dicontohkan di atas.

Pendidikan merupakan wadah dimana pembentukan kultur generasi baru terjadi. Pendidikan adalah rahim dari setiap karakter yang akan dimiliki oleh anak-anak kita di masa

depan. Dengan demikian secara sederhana kita dapat membangun sebuah asumsi bahwa perbaikan pada diri masyarakat secara ideal akan terjadi jika kita benar-benar memperhatikan pendidikan, termasuk dalam bidang politik. Ini sebenarnya selaras dengan prinsip kontekstual dan bermakna dalam kurikulum kita, yaitu menghadirkan kenyataan dunia kepada peserta didik.

Niat baik untuk membersihkan dunia pendidikan dari 'kotornya' politik justru lebih memperbesar peluang untuk membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan pendidikan demi kepentingan politiknya. Kita ambil contoh sederhana, pada era orde baru Pancasila sebagai falsafah negara diajarkan melalui penafsiran tunggal dengan alasan menghilangkan bias-bias politik seperti halnya yang terjadi pada orde lama. Namun justru itulah yang menjadi bumerang, karena penafsiran tunggal yang diajarkan adalah penafsiran yang dibuat oleh penguasa.

Perubahan sistem politik yang begitu terbuka dan desentralistik secara tiba-tiba membuat negeri ini seperti mengalami shock. Jika istilah pengasa dan penindas zaman orde baru adalah mereka para pemimpin di level ibukota maka saat ini penindas dan politikus kotor telah menyebar demikian rata di seluruh lini pelosok tanah air. Upaya pemberantasan KKN juga seolah menjadi lebih sulit. Bahkan bisa jadi karakter korup yang merajalela saat ini lebih parah daripada saat zaman penjajahan.

Sistem pemerintahan yang sehat dan bersih harus dimulai dari sistem politik yang juga bersih. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan reformasi sistem politik dan hukum yang menyeluruh. Seandainya kita bisa mengharapkan perubahan terjadi pada generasi baru, maka seperti halnya reformasi yang dilakukan oleh Budi Utomo, itu seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan yang juga memperhatikan pendidikan politik bagi peserta didik. Tugas ini sangat berat dan butuh waktu. Namun dengan perbaikan di ranah politik, hukum dan pendidikan sekaligus kita masih memiliki harapan untuk munculnya kebangkitan nasional kembali. Perlu dicatat, kebangkitan nasional tahun 1908 mengalami puncak perjuangan 37 tahun berikutnya yaitu saat kemerdekaan RI 1945. Itu bukan waktu yang singkat dan perjuangan yang ringan.

Pada akhirnya, generasi muda yang terdidik berbudaya politik diharapkan kelak akan mampu menempatkan diri mereka sebagai pionir-pionir yang mandiri, mampu memberikan respon secara tepat pada kebijakan pimpinan dan mengerti akan hak dan kewajibannya tanpa menginjak-injak hak orang lain. Selanjutnya, bila ia menjadi pemimpin, ia sudah terbiasa dengan kultur demokratis, menghargai perbedaan dan memperlakukan rakyat yang dipimpinnya dengan bijak dan baik pula.

Berdasarkan hasil angket/*google form*, wawancara dan observasi yang diperoleh dari siswa-siswi SMA se-Kota Singkawang diketahui bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik mereka. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat dari (Wuryan dan Syaifullah, 2007).

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara mesti dilandasi dengan kesadaran poliitik sebagai warga negara. Dan untuk menumbuhkan kesadaran politik tersebut, pendidikan politik memiliki keduudkan yang sangat penting. Pendidikan politik yang dilakukan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa.

Hasil angket menyatakan bahwa pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman politik, dan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi politik. Selain itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik siswa khususnya memberikan pengetahuan dan pemahaman politik pada siswa sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam bentuk kesadaran politik diantaranya kepribadian politik, perilaku politik, dan partisipasi politik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa-siswi SMA/SMK/MA di Kota Singkawang.

Pendidikan politik di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn, OSIS, dan Pramuka. Pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn disampaikan dalam materi pembelajaran seperti suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia dan materi-materi lainnya. Pendidikan politik di sekolah melalui OSIS seperti mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS), ikut dalam pemilihan ketua osis, dan pembentukan pengurus osis. Pendidikan politik melalui Pramuka seperti ikut seminar dan atau diklat kepemimpinan Pramuka, kursus kepemimpinan Pramuka, mengikuti pembinaan oleh pembina pramuka, DKR, DKC, DKD, maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam Pramuka.

Dari hasil wawancara dengan guru PPKn mengenai pendidikan politik di sekolah, terungkap bahwa dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terdapat beberapa materi politik seperti hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sistem keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Penyampaian ini menuntut guru PPKn untuk memberi pemahaman kepada siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran politik siswa, dan mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di sekolah atau lebih luasnya dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pendidikan politik di sekolah disampaikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) agar siswa mengerti makna politik, tujuan politik, kegunaan politik dan sadar politik di sekolah khususnya dan dalam kehidupan umumnya di masyarakat dan Negara.

Pendidikan politik melalui program pengembangan diri, antara lain melalui OSIS, dan Pramuka diharapkan mampu membuat siswa sadar dan berpartisipasi dalam kepemimpinan OSIS, kepemimpinan Pramuka, kegiatan yang diselenggarakan OSIS, kegiatan yang diselenggarakan Pramuka.

Berdasarkan paparan di atas terkait pendidikan politik di sekolah baik melalui PPKn, OSIS, maupun Pramuka dalam membina siswa agar mereka memiliki kesadaran politik, antara lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan OSIS dan Pramuka di sekolah secara proporsional. Tuntutan itu mengemukakan agar supaya siswa siap berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa dengan penuh tanggung jawab.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang adalah dalam bentuk sosialisasi pemilu ke sekolah-sekolah SMA/SMK/MA, dalam rangka menyampaikan informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu kepada siswa yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula. Penyampaian informasi kepada Pemilih ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Selain itu, KPU Kota Singkawang menyediakan rumah pintar pemilu yang bisa dikunjungi oleh para siswa untuk mengetahui bagaimana tata cara pencoblosan suara.

Siswa yang memperoleh pendidikan tersebut, partisipasi politiknya menjadi meningkat ditandai dengan dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan kesadaran siswa berpartisipasi dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah. Partisipasi politik siswa juga terlihat dari kesiapan mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula, untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa-siswi SMA/SMK/MA di Kota Singkawang. Pendidikan politik di sekolah, dilaksanakan melalui mata pelajaran PPKn, kegiatan OSIS, kegiatan Pramuka, dan melalui sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang. Pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn disampaikan dalam materi pembelajaran. Pendidikan politik melalui kegiatan OSIS seperti mengikutlatihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS), pemilihan ketua dan pengurus OSIS. Pendidikan politik melalui Pramuka seperti ikut seminar dan atau diklat kepemimpinan Pramuka, kursus kepemimpinan Pramuka, mengikuti pembinaan oleh pembina pramuka, DKR, DKC, DKD, maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam Pramuka. Hal ini dilaksanakan agar supaya siswa siap berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang adalah dalam bentuk sosialisasi pemilu ke sekolah-sekolah SMA/SMK/MA, dalam rangka menyampaikan informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu kepada siswa yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula. Penyampaian informasi kepada Pemilih ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Selain itu, KPU Kota Singkawang menyediakan rumah pintar pemilu yang bisa dikunjungi oleh para siswa untuk mengetahui bagaimana tata cara pencoblosan suara. Siswa yang memperoleh pendidikan tersebut, partisipasi politiknya menjadi meningkat ditandai dengan kemampuan siswa berpendapat didalam kelas, dan kesadaran siswa berpartisipasi dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka, dan ikut aktif dalam Organisasi lainnya yang ada di sekolah. Partisipasi politik siswa juga terlihat dari kesiapan mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula, untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (1992). *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Al Muchtar, Suwarma. (2000). *Pengembangan Kemampuan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Arbi, Sanit. (1997). *Partai, Pemilu Dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka pelajar.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV. Alfabetha
- John Dewey. 2004. *Democracy and Education*. Bandung: Teraju (terjemahan).

- Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: sinar baru argensindo.
- Kartono, Kartini. (2009), *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju
- Khalehar, M.F.A., Ade A.J.S, Ivan S.Z., Prayetno. (2017). Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (1), halaman 99-101.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik, *Jurnal Hmu Pemerintahan dan Sosial Polifik*, 2 (1), halaman 78-90.
- Litbang Kompas/Gianie. "Memetakan Minat pemilih pemula", (Online: www.Indonesiamemilih.com).
- Lubis, Yusnawan, Sodeli. (2018). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Untuk Kelas XII untuk Pendidikan Menengah Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018
- Marbun, B.N. (2013). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'ued. Mochtar, Colin, Mac A. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pahmi, Sy. (2010). *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Paramita, Patricia Diana. (2011). Keterkaitan Antara Politik Dan Kekuasaan Dalam Organisasi. Bandung: PT Refika Adhitama.
- Prihatmoko, Moesafa Joko J. (2008). *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ruslan, Utsman Abdul Muiz. (2000). *Pendidikan Politik Ikhwal Muslimin*. Solo:Intermedia.
- Sastroadmojo, S. (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. (2010). *Modul: Pemilu untuk Pemula*". Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum.
- Sitepu, P.A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, (2009). "Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)", (Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI).
- Wuryan, Sri dan Syaifullaah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewargaanegaraan UPI.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RI.